BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa ...

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Pidie Jaya Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Pidie Jaya Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang..

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Qanun ...

10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Pasal 2

Renja SKPK Pidie Jaya Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2022 yang ditetapkan sesuai nomor Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja SKPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPK yang berpedoman pada Renstra SKPK dan RKPK.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman SKPK dalam menyusun RKA Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 20 Agustus 2021 M
11 Muharram 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 20 Agustus 2021 M
11 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Agustus 2021 M
11 Muharram 1443 H

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
(RENJA SKPK) PIDIE JAYA
TAHUN 2022

NO	NOMOR RENJA	SKPK
1	2	3
1.	Renja/01/VIII/2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Renja/02/VIII/2021	Dinas Pendidikan Dayah
3.	Renja/03/VIII/2021	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
4.	Renja/04/VIII/2021	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
5.	Renja/05/VIII/2021	Rumah Sakit Umum Daerah
6.	Renja/06/VIII/2021	Dinas Pekerjaan Umum
7.	Renja/07/VIII/2021	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
8.	Renja/08/VIII/2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Renja/09/VIII/2021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Renja/10/VIII/2021	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Renja/11/VIII/2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Renja/12/VIII/2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
13.	Renja/13/VIII/2021	Dinas Perhubungan
14.	Renja/14/VIII/2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.	Renja/15/VIII/2021	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
16.	Renja/16/VIII/2021	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.	Renja/17/VIII/2021	Dinas Kelautan dan Perikanan
18.	Renja/18/VIII/2021	Dinas Pertanian dan Pangan
19.	Renja/19/VIII/2021	Dinas Perkebunan dan Peternakan
20.	Renja/20/VIII/2021	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
21.	Renja/21/VIII/2021	Sekretariat Daerah Kabupaten
22.	Renja/22/VIII/2021	Sekretariat DPRK
23.	Renja/23/VIII/2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24.	Renja/24/VIII/2021	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
25.	Renja/25/VIII/2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26.	Renja/26/VIII/2021	Inspektorat
27.	Renja/27/VIII/2021	Kecamatan Bandar Dua

28. Renja ...

NO	NOMOR RENJA	SKPK
1	2	3
28.	Renja/28/VIII/2021	Kecamatan Jangka Buya
29.	Renja/29/VIII/2021	Kecamatan Ulim
30.	Renja/30/VIII/2021	Kecamatan Meurah Dua
31.	Renja/31/VIII/2021	Kecamatan Meureudu
32.	Renja/32/VIII/2021	Kecamatan Trienggadeng
33.	Renja/33/VIII/2021	Kecamatan Panteraja
34.	Renja/34/VIII/2021	Kecamatan Bandar Baru
35.	Renja/35/VIII/2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36.	Renja/36/VIII/2021	Dinas Syariat Islam
37.	Renja/37/VIII/2021	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
38.	Renja/38/VIII/2021	Sekretariat Baitul Mal
39.	Renja/39/VIII/2021	Dinas Pertanahan
40.	Renja/40/VIII/2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41.	Renja/41/VIII/2021	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1. BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS